

## **BAB II**

### **KURIKULUM, PENGEMBANGAN KURIKULUM, DAN PENDIDIKAN ISLAM**

#### **A. Kurikulum**

Pada bab II akan dibahas konsep tentang kurikulum, pengembangan kurikulum dan pendidikan Islam.

##### **1. Pengertian Kurikulum**

Kurikulum berasal dari bahasa latin yang mempunyai kata dasar *currere*, secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan tersebut ada batas *start* dan batas *finish*. Dalam kosa kata Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata *manhaj* yang berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupannya (al-Syaibany, 1997: 478 pada Khaeruddin, 2007: 24).

Dalam lapangan pendidikan pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti, dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhiri, dan bagaimana cara untuk menguasai bahan agar dapat mencapai gelar (Dakir, 2004: 2).

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 dalam Sistem Pendidikan Nasional (1989: 63) menyatakan bahwa :

“Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.”

Dalam pengertian lain Sudjana (2005:3) mendefinisikan bahwa kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah. Dengan demikian, isi kurikulum adalah pengetahuan ilmiah, termasuk kegiatan dan pengalaman belajar, yang disusun sesuai dengan taraf perkembangan siswa.

Lain halnya dengan William B. Ragan, sebagaimana dikutip oleh Dakir (2004: 4) berpendapat bahwa kurikulum ialah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah.

Adapun Nengly and Evaras (1967) menyatakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan dan dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik (Dakir, 2004: 5).

Sedangkan Abdul Qadir Yusuf dalam kitabnya *at-Tarbiyah wal Mujtami'* mendefinisikan kurikulum sebagai berikut:

المنهج في التربية الحديثة بأنه مجموعة  
خبرات وتجارب تعلم الأطفال تحت إرشاد  
المدرسة.

“ kurikulum adalah sebuah pengalaman dan uji coba dalam proses belajar mengajar siswa di bawah bimbingan lembaga (sekolah)” (Khaeruddin, 2007: 26)

Dalam pengertian lain, kurikulum adalah ciri utama pendidikan di sekolah. Keberadaan kurikulum bersifat mutlak bagi institusi sekolah (Muliawan, 2005: 181). Kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran di sekolah.

Dengan demikian, kurikulum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di suatu lembaga pendidikan yang terorganisir dengan terencana dan siap diimplementasikan. Seluruh komponen dalam hal ini akan terlibat dalam pelaksanaan kurikulum yang akan diterapkan di suatu lembaga pendidikan tersebut.

## **2. Landasan filosofis Kurikulum**

Landasan filosofis yang dimaksud adalah pentingnya filsafat dalam melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum di sekolah. Istilah landasan filosofis kurikulum lebih mengarah pada ciri-ciri dibentuknya suatu pendidikan Islam.

Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, sebagaimana dikutip oleh Abudin (1997: 127) menyebutkan lima ciri kurikulum pendidikan Islam. Kelima ciri tersebut adalah:

- a) Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama.
- b) Meluas cakupannya dan menyeluruh kandungannya. Yaitu kurikulum yang betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran dan ajaran yang menyeluruh. Di samping itu juga luas dalam perhatiannya. Ia memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual.
- c) Bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Selain itu juga seimbang antara

pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan pengembangan sosial.

- d) Bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik.
- e) Kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik.

Dengan demikian, implikasi bagi para pelaksana pendidikan, terutama bagi guru, kepala sekolah dalam melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum di sekolah, nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan harus menjadi acuan yang mendasar, dalam mewujudkan praktek pendidikan di sekolah, sehingga menghasilkan anak didik (siswa) menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan beramal dalam kondisi serasi, selaras dan seimbang (Sudjana, 2005: 11).

Dari pernyataan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa kurikulum disusun berdasarkan tujuan filosofis pendidikan Islam dari suatu lembaga pendidikan Islam. Ia memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian hasil yang dicapai adalah menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan beramal dalam kondisi serasi, selaras dan seimbang.

### **3. Komponen Kurikulum**

Kurikulum mempunyai komponen-komponen, antara lain:

### **a. Tujuan Kurikulum**

Tujuan adalah segala sesuatu yang ingin dicapai. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir, 2004: 22).

Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Tujuan kurikulum pendidikan Islam meliputi dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (anak didik) (Khaeruddin, 2007: 32).

Hamalik (2007: 177) menyatakan bahwa perumusan tujuan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat, dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Tujuan kurikulum merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, karena dari tujuan inilah kurikulum yang telah disusun pada suatu lembaga dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan oleh suatu lembaga pendidikan dalam mencetak lulusannya.

### **b. Isi Kurikulum**

Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang meliputi bahan kajian dan mata pelajaran.

Hamalik (2007: 178) menyebutkan bahwa isi kurikulum adalah mata pelajaran pada proses belajar-mengajar, seperti

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran.

Menurut Saylor dan Alexander (1966) yang dikutip oleh Rusman (2009: 26) isi kurikulum adalah fakta, observasi, persepsi, ketajaman, sensibilitas, desain, dan solusi yang tergambar dari apa yang dipikirkan oleh seseorang yang secara keseluruhan diperoleh dari pengalaman dan semua itu merupakan komponen yang menyusun pikiran yang mereorganisasi dan menyusun kembali hasil pengalaman tersebut ke dalam adat dan pengetahuan, ide, konsep, generalisasi, prinsip, rencana, dan solusi.

Nurgiantoro (1988: 10) mengatakan bahwa isi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan.

### **c. Strategi Pelaksanaan Kurikulum**

Strategi yang dimaksudkan adalah strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Masalah strategi pelaksanaan itu dapat dilihat dalam cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan dan konseling, pengaturan kegiatan sekolah secara keseluruhan, pemilihan metode pengajaran, alat atau media pengajaran dan semua hal yang berhubungan dengan pendidikan di suatu lembaga (Nurgiantoro, 1988: 11).

Strategi berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan dalam suatu lembaga pendidikan. Strategi ini

bertujuan berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Guru-guru berusaha membantu para siswa menemukan minat dan kebutuhannya. Para siswa sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Para siswa sesuai dengan minatnya masing-masing baik dalam kegiatan pleno maupun kelompok-kelompok berusaha memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Kerjasama yang baik antar individu dalam kegiatan kelompok, maupun antar kelompok dalam kegiatan pleno sangat mewarnai metoda /strategi dalam pelaksanaan kurikulum (Syaodih, 1988: 100-101).

Strategi dalam hal ini sangat berhubungan dengan tercapainya kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Jadi, dalam mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan diperlukan strategi-strategi handal dalam mencapai kurikulum yang telah disepakati dalam suatu lembaga pendidikan.

#### **d. Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi berasal dari kosa kata Inggris *evaluation* yang berarti pengukuran. Evaluasi adalah suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti dari sesuatu yang dipertimbangkan (Hasan, 1988: 13).

Evaluasi kebutuhan dan kelayakan kurikulum pada dasarnya adalah keseluruhan kegiatan secara sistemik untuk menilai semua bentuk kebutuhan. Dalam hal ini digunakan metode dan instrumen

pengumpulan data dan informasi yang andal yang pada gilirannya mendasari pengembangan desain pendidikan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu dan memiliki derajat kelayakan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan (Hamalik, 1993: 52-53).

## **B. PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Pengembangan kurikulum adalah perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lain (Soemanto, 1986: 45). Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian.

Hamalik menyebutkan (2007: 183) bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar-mengajar, antara lain jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber mengacu pada unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar mengajar.



Menurut Rusman (2009: 60) salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkenaan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah.

Setiap pengembangan kurikulum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pengembangan kurikulum antara lain adalah untuk mengurutkan tujuan-tujuan pengajaran secara sistematis logis sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya secara saling berhubungan sepanjang tahun (Nurgiyantoro, 1988: 86).

Langkah-langkah pengembangan kurikulum sebagaimana diuraikan oleh Ali (2005: 66) sebagai berikut:

### **1. Perumusan tujuan.**

Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan dan harapan. Oleh karena itu tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan. Hal tersebut telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

## 2. Menentukan Isi

Isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Pengalaman belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran-mata pelajaran, atau jenis-jenis pengalaman belajar lain sesuai dengan bentuk kurikulum itu sendiri.

Rusman (2009: 29) menyatakan bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menetapkan isi kurikulum adalah: (1) tingkat kematangan siswa; (sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan kematangan siswa); (2) tingkat pengalaman anak; dan (3) taraf kesulitan materi, yaitu disusun dari yang konkret menuju yang abstrak, dari yang mudah menuju yang susah, dan dari yang sederhana menuju yang kompleks.

Menurut Yamin (2006: 68) isi kurikulum selain menumbuhkan kecakapan sosial, seperti kecakapan bekerja kooperatif, kolaboratif, dan solidaritas. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi kecakapan hidup (*life skill*), membelajarkan siswa secara terkondisi dan bermaknaan, dan tidak menuntut mereka untuk menghafal materi pengetahuan, melainkan kecakapan yang dapat ditularkan di tengah masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari yaitu masyarakat belajar (*learning sociality*).

Selanjutnya Hamalik (2007: 52) membuat kriteria pemilihan isi kurikulum, dengan berpatokan pada karakteristik masyarakat (*social science*). Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Isi kurikulum harus bersifat kekinian, artinya isinya harus memuatkan pengetahuan, penemuan-penemuan baru.
- 2) Isi kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi-generalisasi. Generalisasi-generalisasi menjadikan landasan dalam memilih data faktual dalam ruang lingkup pengetahuan yang sedang berkembang.
- 3) Isi kurikulum dapat memberi kontribusi pengembangan keterampilan, kecakapan hidup, berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Individu harus mampu menggunakan kemampuan rasional, berfikir logis, serta membedakan fakta dan perasaan.
- 4) Isi kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Pendidikan profesional harus mampu membuat keputusan yang berjangka panjang.
- 5) Isi kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi para siswa. Pemilihan isi kurikulum harus berdasarkan pada maknanya bagi perubahan sosial dan bermakna bagi tujuan/ maksud para siswa.
- 6) Isi kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. Belajar mempengaruhi tingkah laku dan

mengembangkan keinginan untuk belajar terus, karena itu pemilihan isi kurikulum harus berdasarkan tingkat kematangan dan pengalaman siswa.

- 7) Isi kurikulum menyumbang terhadap pertumbuhan yang seimbang, yakni pertumbuhan siswa secara menyeluruh, seperti: pertumbuhan kepribadian, kemasyarakatan, dan perkembangan sebagai tenaga pengajar. Jadi, program diperlukan dalam situasi-situasi kehidupan.
- 8) Isi kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran serta pengalaman selanjutnya.

Isi kurikulum dalam hal ini adalah yang menentukan mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan isi kurikulum, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Jenis-jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

### **3. Organisasi dan proses belajar mengajar**

Organisasi kegiatan dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman-pengalaman belajar yang menjadi isi kurikulum, dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan.

Dalam implementasi kurikulum, dikembangkan model pengorganisasian isi kurikulum yang biasa, yaitu yang dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran atau biasa disebut *separated subject curriculum*, dan juga pengorganisasian yang lebih bersifat terpadu. Pada

penelitian ini akan dibahas tentang kurikulum yang bersifat terpadu atau dalam istilah lain *integrated curriculum*. Selanjutnya akan diuraikan tentang pengorganisasian kurikulum dan jenis-jenisnya.

#### 4. Evaluasi kurikulum

Evaluasi kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum, dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan.

Evaluasi kurikulum membahas berbagai kegiatan memonitor, baik proses maupun produknya pada pelaksanaan kurikulum dengan maksud mencari data untuk keperluan revisi lebih lanjut. Dalam penilaian kurikulum, sebagaimana dinyatakan oleh Dakir (2004: 10) ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) *Reflective evaluation*

*Reflective evaluation* yaitu penilaian kurikulum sebelum kurikulum dilaksanakan. Jadi penilaian yang dilakukan di belakang meja atas dasar berbagai pertimbangan para ahli yang berupa landasan teori, hasil penelitian, pengalaman, musyawarah, dan sebagainya.

b) *Try out evaluation*

Perlunya evaluasi pada *try out* adalah dengan harapan agar sebelum dilaksanakan dicobakan terlebih dahulu pada skala kecil, pada beberapa sekolah yang dianggap dapat mewakili untuk

diketahui berbagai kelemahan yang mungkin terjadi dan dijadikan bahan pertimbangan untuk diadakan revisi seperlunya.

c) *Formative evaluation*

Setelah kurikulum yang direvisi atas dasar *try out* tersebut selesai kemudian didesiminasikan ke sekolah-sekolah yang lebih luas lagi, dimonitor tahap demi tahap, komponen demi komponen, kemudian diadakan evaluasi. Evaluasi demikian disebut *formative evaluation*.

d) *Summative evaluation*

Evaluasi secara sumatif dilakukan dengan cara mengevaluasi secara keseluruhan baik prosesnya maupun produknya.

Evaluasi dalam kurikulum sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kurikulum yang telah direncanakan pada suatu proses pendidikan. Evaluasi dalam kurikulum yang sedang dikembangkan merupakan suatu keharusan, karena evaluasi menentukan berhasil tidaknya kurikulum yang sedang diimplementasikan.

### **C. KONSEP KURIKULUM TERPADU**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada berbagai pengorganisasian kurikulum, yang mengupas bagaimana bentuk bidang studi harus disajikan di depan kelas yang konsekuensinya akan diikuti oleh tindakan bagaimana cara

memilih bahan ajar dan cara mengevaluasinya. Pada garis besarnya ada tiga pengorganisasian pokok yaitu:

1. *Separate subject curriculum*, kalau bidang studi secara terpisah diajarkan dengan pembatasan bahan serta waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, masing-masing diajar oleh guru dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. *Correlated curriculum*, kalau berbagai bidang studi yang sejenis dikelompokkan untuk membahas suatu topik yang relevan. Misalnya kelompok mata pelajaran biologi, fisika, kimia dijadikan suatu kelompok bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
3. *Integrated curriculum*, kalau suatu topik atau permasalahan dibahas dengan berbagai pokok bahasan baik dari bidang studi yang sejenis maupun dari bidang studi lain yang relevan.

Dalam pembahasan ini penulis akan menitikberatkan pada pembahasan tentang *integrated curriculum* sebagaimana yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, *integrated curriculum* adalah usaha mengintegrasikan bahan pelajaran dari berbagai mata pelajaran menghasilkan kurikulum yang *integrated* atau terpadu. Integrasi ini tercapai dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan pemecahannya dengan bahan dari segala macam disiplin atau mata pelajaran yang diperlukan. Bahan mata pelajaran menjadi instrumental dan

fungsional untuk memecahkan masalah itu. Batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan (Nasution, 2003: 111 dalam Raharjo, 2006: 21).

*Integrated curriculum* atau Integratif kurikulum mengutamakan segi-segi psikologi yang berpengaruh terhadap integrasi pribadi individu di lingkungannya (Soemanto, 1986: 80).

Menurut Rusman (2009: 65) kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus *integrated* atau terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan.

Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran.

Hamalik (2007: 158) menyatakan bahwa dalam kurikulum terintegrasi atau terpadu (*integrated curriculum*) ini, batas-batas di antara semua pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali, karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk unit. Jadi semua mata pelajaran telah terpadu sebagai satu kesatuan yang bulat.

Ciri-ciri kurikulum terpadu, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamalik (2007: 158) adalah sebagai berikut:



- a. Berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi;
- b. Berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organismik;
- c. Berdasarkan landasan sosiologis dan sosial kultural;
- d. Berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa;
- e. Bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas. Bahkan, mata pelajaran atau bidang studi baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guna pemecahan masalah;
- f. Sistem penyampaian menggunakan sistem unit, baik unit pengalaman (*experience unit*) atau unit pelajaran (*subject matter unit*).
- g. Peran guru sama aktifnya dengan peran murid. Bahkan peran murid lebih menonjol dalam kegiatan belajar mengajar, dan guru bertindak selaku pembimbing.

Jika dilihat dari sudut bahan diantaranya tertera sebagai berikut:

- (1) Bahan disajikan secara menyeluruh.
- (2) Sumber bahan tidak hanya terbatas pada buku sumber, bahkan mementingkan sumber dari pengalaman baik dari pihak guru maupun dari pihak peserta didik.
- (3) Bahan langsung berhubungan dengan masalah yang diperlukan oleh peserta didik di masyarakat.
- (4) Bahan ditentukan secara demokratis antara guru dengan peserta didiknya.
- (5) Bahan dapat diambil dari hal-hal yang dianggap aktual dan memperhatikan situasi dan kondisi sekitar

(Dakir, 2004:49).

Kalau dilihat dari sudut guru, dalam pelaksanaannya, guru diharapkan mampu bertindak sebagai:

1. *Manajer*, tugasnya yaitu:
  - a. Sebagai *organisator*, guru hendaknya dapat membuat program yang direncanakan, mengatur berbagai kegiatan antar peserta didik, mengatur berbagai kegiatan antar peserta didik, mengatur bagaimana bahan disajikan, mengatur berbagai tugas pada peserta didik
  - b. Sebagai *motivator*, guru hendaknya mampu memberi semangat belajar dan bekerja pada peserta didiknya.
  - c. Sebagai *koordinator*, guru hendaknya mampu mengatur agar tugas yang diberikan tidak tumpang tindih atau *overlap* antar kelompok.
  - d. Sebagai *conductor*, guru hendaknya mampu member pimpinan yang tegas harus
2. *Administrator*, tugasnya yaitu:
  - a. Sebagai *dokumentator*, guru hendaknya mencatat segala kegiatan yang dilaksanakan, menyimpan secara sistematis semua *file* yang diperlukan.
3. *Supervisor*, tugasnya yaitu:
  - a. Sebagai *counselor*, guru hendaknya dapat memberi bimbingan dan arahan yang positif.
  - b. Sebagai korektor, guru hendaknya dapat menunjukkan tugas yang baik untuk dilaksanakan dan mana tugas yang harus dihindari.

4. *Instructor*, tugasnya yaitu:

- a. Sebagai fasilitator, guru hendaknya tidak menjadikan diri nomor satu di muka kelas, dapat menimbulkan situasi yang kondusif sehingga peserta didik dapat aktif dan inisiatif sendiri.
- b. Sebagai moderator, hendaknya guru hanya sebagai perantara dalam hal untuk memusatkan sesuatu yang akan diambil oleh peserta didik.
- c. Sebagai komunikator, guru hendaknya mampu mengadakan hubungan yang harmonis baik dengan pihak-pihak di dalam sekolah maupun pihak-pihak di luar sekolah dan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pembelajaran maupun tugas lain yang relevan.

5. *Inovator*, tugasnya yaitu:

- a. Sebagai dinamisator, sekolah hendaknya sebagai laboratorium hidup bagi masyarakat sekitar. Artinya penemuan-penemuan baru yang dipimpin oleh guru hendaknya dapat disebarluaskan di luar lingkungan sekolah (Dakir, 2004: 51).

Apabila dilihat dari sudut peserta didik, dampaknya akan berupa sebagai berikut: Apabila dalam melaksanakan *intregated curriculum* ini, guru mau berfungsi seperti tersebut di atas maka peserta didik diharapkan dalam belajar akan bersikap: (1) *Learn to know*, yaitu belajar dengan menentukan berbagai cara agar lebih mengetahui segala sesuatu, sehingga akan terjadi *how to learn* yang berlangsung terus menerus. (2) *Learn to do*, yaitu belajar untuk berbuat sebagaimana mestinya, terutama dalam hal pemecahan berbagai masalah dalam lapangan hidup yang berguna bagi dirinya sendiri. (3) *Learn to live together*

atau *live with other*, yaitu belajar untuk menyesuaikan diri, adaptasi dengan sekitar sehingga yang bersangkutan dapat bekerja sama dengan pihak lain dan bersifat toleran. (4) *Learn to be*, yaitu belajar yang dapat mengembangkan segala aspek pribadinya, atau potensi yang melekat pada dirinya sehingga menjadi manusia yang utuh (*the complete fulfillment of men*) (Dakir, 2004: 52).

Di samping itu kalau pelaksanaannya dilaksanakan secara betul, akan mempunyai dampak pula pada peserta didik diantaranya adalah: (1) Mendorong peserta didik untuk lebih mandiri, percaya diri, kreatif, dan punya harga diri. (2) Karena dalam kegiatan dituntut laporan baik lisan maupun tulisan akan berdampak pada perkembangan piker dan kemampuan berbahasa. (3) Menghargai perbedaan individual. (4) Peserta didik punya pengalaman yang luas dan fungsional ( Dakir, 2004: 52).

Jika dilihat dari sudut metode, menurut Barbara Mathews (1993) sebagaimana yang dikutip oleh Dakir (2004: 52) disarankan menggunakan metode:

a) *Inquiry learning*

Karena peserta didik dihadapkan dengan suatu masalah yang hanya dicari jawabannya sendiri, maka kegiatan diskusi Tanya jawab, pengumpulan data yang kemudian diadakan analisis bersama untuk mencari jawabannya.

b) *Problem solving*

Sesuai dengan pelaksanaan metode inquiry tentu mencari berbagai penyebab terjadinya permasalahan, kemudian didiagnosa baru dicari cara pemecahannya.

c) *Investigating*

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perlu adanya suatu penelitian yang cermat mengenai berbagai komponen atau aspek yang tidak beres. Mengapa sampai terjadi demikian. Dibicarakan bersama dengan berbagai alternatif tindakan dan saling mengkaji, kemudian diadakan *check* and *recheck* yang akhirnya akan ditemukan suatu pemecahannya.

d) *Brain storming*

Sejenis pertemuan informal yang mulai dari berbagai pernyataan pendapat dari para peserta pertemuan. Semua pendapat di tamping dan tidak perlu di beri komentar. Setelah semua pendapat masuk, kemudian diadakan klasifikasi pendapat yang disingkirkan, karena tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

e) *Cooperating learning*

Berbagai masalah yang timbul dipecahkan secara tim dan dibahas secara demokrasi. Tim terdiri dari para anggota yang seminat dan sekeahlian.

Apabila dilihat dari segi pelaksanaan evaluasi, diantaranya yaitu: (1)  
Yang dievaluasi adalah mengenai berbagai kelemahan atau kekurangan baik

dalam prosesnya maupun hasil nyatanya (produknya). (2) Bagaimana keefektifan pencapaian hasil. (3) Penilaian dalam kelas, yang dinilai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja sama, sifat toleran anggotanya. (4) Penilaian dalam kelompok, yang dinilai dalam hal mutu laporan tertulis atau lisan, dapat tidaknya anggota bekerja sama dalam kelompok. (5) Penilaian kerja antar grup dan hasil nyata dari grup. (6) Penilaian individual atas dasar pengamatan guru dalam hal kekreatifannya, toleransinya, sumbangannya terhadap proses maupun produknya. (7) Hasil nyata kelas dipamerkan untuk umum kalau perlu disebarluaskan ke masyarakat.

Berbagai kesulitan dalam pelaksanaan *integrated curriculum* diantaranya adalah:

1. Guru kurang siap melaksanakan *integrated curriculum*.
2. Selama ujian (terutama ujian Negara) masih dilaksanakan dengan cara *subject matter*, *integrated curriculum* tidak mungkin dilaksanakan.
3. Di sekolah negeri harus mengikuti berbagai peraturan yang seragam terutama pada kurikulumnya.
4. Kadang-kadang terhambat karena terbatasnya sarana prasarana yang diperlukannya, misalnya: laboratorium, kebun percobaan, dan berbagai peralatan yang lain yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan mengajar secara tim masih belum bisa (Dakir, 2004: 53).

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pernyataan bahwa dalam pengembangan kurikulum model *Integrated curriculum* mempunyai beberapa

kelebihan dalam pelaksanaan dan hasilnya antara lain adalah dalam pelaksanaannya guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik. Beberapa kendala dalam pelaksanaannya adalah guru belum siap dalam pelaksanaannya serta beberapa kendala lainnya.

#### **D. PENDIDIKAN ISLAM**

Pendidikan Islam mempunyai arti baik secara substansi maupun secara lembaga. Sebelum penulis membahas pengertian pendidikan Islam, terlebih dahulu akan diulas tentang pengertian pendidikan secara umum.

##### **1. Pendidikan**

Di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Suwarno, 2008: 21-22).

Adapun Hamalik (1995: 3) mendefinisikan pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara layak dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Nana Sudjana (2005: 1) Pendidikan adalah upaya manusia untuk “memanusiakan manusia”. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibandingkan makhluk lain ciptaanNya disebabkan memiliki kemampuan berbahasa dan akal pikiran/ rasio, sehingga manusia mampu mengembangkan dirinya sebagai manusia yang berbudaya.

Dalam pengertian lain Daud (1995: 138) menyatakan bahwa dalam system pendidikan Islam selain akhlak atau etika, keindahan atau estetika, ilmu dan teknologi, yang hal tersebut merupakan nilai budaya manusia, nilai-nilai yang dipindahkan adalah juga nilai yang berasal dari Tuhan, yaitu wahyu atau agama, yang dirumuskan dengan ilmu abadi.

Lain halnya dengan Muliawan (2005: 223), ia menyatakan bahwa pendidikan sebagai suatu proses perekayasaan yang diusahakan secara sadar untuk meningkatkan budi pekerti maupun akhlak manusia akan melahirkan kesadaran hak, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing individu ini dalam kehidupan bermasyarakat akan melahirkan suatu sistem kebudayaan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menuju proses memanusiakan manusia, sehingga akan melahirkan kesadaran hak, tanggung jawab, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.



## 2. Pendidikan Islam

Setelah membahas tentang pengertian pendidikan, penulis selanjutnya akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam dan bagaimana perbedaan antara keduanya secara pengertian.

Tujuan Pendidikan pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk memanusiakan manusia agar ia benar-benar mampu menjadi khalifah di muka bumi ini (Q.S: 2: 30) sebagaimana tujuan ia diciptakan, yaitu untuk menyembah kepada-Nya (Q.S : 51: 56).

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada sub bab sebelumnya bahwa pengertian pendidikan dalam pengertian yang dituliskan dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah agar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Tujuan dan pengertian tersebut tidaklah saling bertentangan, bahkan dalam melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ketika manusia ditugaskan untuk menjadi pemimpin di bumi ini, manusia membutuhkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses pendidikan.

Pendidikan Islam pada dasarnya secara filosofis tidak berbeda dengan pengertian yang terkandung dalam konsep pendidikan. Penambahan kata Islam dalam hal ini berfungsi sebagai pembeda objek

konkret realitas yang menjadi telaah. Sehingga istilah pendidikan Islam menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan istilah pendidikan.

Muliawan (2005: 94) menyatakan bahwa alasan rasional adalah pendidikan Islam itu terbatas pada segala sesuatu yang berhubungan dengan orang Islam, sebaliknya istilah pendidikan tidak terbatas pada orang Islam saja tetapi semua lapisan masyarakat dari berbagai kepercayaan.

Selanjutnya, ia mendefinisikan bahwa Pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan yang dikelola, dilaksanakan, dan diperuntukkan bagi umat Islam (Muliawan, 2005: 154).

Menurut Sanaky (2003:130) Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berwawasan semesta, berwawasan kehidupan yang utuh dan multidimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam secara integratif.

Pelaksanaan pendidikan Islam diarahkan pada dua dimensi, yaitu: Pertama, dimensi dialektikal (*horizontal*), artinya pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkrit kehidupan manusia, dan kemudian manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan menurut pandangan Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Sanaky (2003: 131) didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu dijadikan sebagai khalifah di bumi (QS.: 2: 130) untuk mengabdikan kepada

Allah, yang dilengkapidengan *fitrah* yaitu potensi bawaan berupa potensi keimanan (tauhid), potensi untuk memikul amanah dan tanggung jawab, potensi kecerdasan (akal) (QS.:2: 31 dan 33), potensi komunikasi dengan bahasa (potensi *al bayan*), dan potensi fisik.

Tanpa rumusan operasional pendidikan Islam selalu terperangkap di dalam dilema dikotomi ilmu di atas yang sebenarnya tidak sesuai fungsi Islam. Islam adalah panduan hidup manusia di dunia dan akhirat yang bukan sekadar agama seperti yang dipahami selama ini, tapi meliputi seluruh aspek dan kebutuhan hidup manusia. Ilmu dalam Islam meliputi semua aspek ini yang bias disusun secara hierarkis dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia hingga makhluk gaib dan puncak kegaiban.

Karena itu pemikiran Islam tentang ilmu dan pendidikan hingga praktik di lapangan harus dikaji ulang secara praktik di lapangan harus dikaji secara kritis. Kajian ini diperlukan dalam rangka mengembalikan nilai-nilai yang Islami yang belum dipraktikkan dalam pendidikan Islam, bahkan hampir hilang dari pengertian pendidikan Islam.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian pendidikan Islam dapat dibedakan secara substansi dan secara kelembagaan:

#### **a. Pendidikan Islam sebagai Isi**

Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba dalam Abudin (1997: 49) adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Pendidikan Islam secara substansi adalah pendidikan yang di dalamnya membahas apa dan bagaimana pendidikan. Sehingga terdapat tiga instrumen dalam hal ini yaitu, penjelasan mengenai pendidikan, tujuannya, dan cara mencapai tujuan dalam proses pendidikan tersebut (Muliawan, 2005: 98).

Menurut Muhaimin (1993: 15) dalam pengertian pendidikan Islami adalah pendidikan yang falsafah dasar, tujuan-tujuannya dan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pendidikan didasarkan atas nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk pribadi yang beribadah kepada Allah. Sifat tujuan umum ini tetap dan berlaku di sepanjang tempat, waktu dan keadaan (Abuddin: 1997: 56).

Konsep pendidikan Islam harus dirujuk dari berbagai aspek, antara lain aspek keagamaan, aspek kesejahteraan, aspek kebahasaan, aspek ruang lingkup dan aspek tanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan aspek keagamaan adalah bagaimana hubungan Islam sebagai agama dengan pendidikan. Yang dimaksudkan adalah apakah ajaran Islam memuat informasi pendidikan sehingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan konsep pendidikan Islam.

Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan Barat sekuler, terutama karena pendidikan Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh

Karim (1991: 30) tidak hanya didasarkan atas hasil pemikiran manusia dalam menuju *kemashlahatan* umum atau *humanisme universal*. Pendidikan Islam pada akhirnya bermuara pada pembentukan manusia sesuai dengan kodratnya yang mencakup dimensi *imanensi* (horizontal) dan dimensi transedensi (vertikal; hubungan dan pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Pencipta).

Pendidikan Islam idealnya tentu lepas dari berbagai pandangan dikotomis. Para pemikir pendidikan Islam terdahulu lepas dari dikotomi ini. Miskawaih misalnya, menekankan betapa pentingnya pendidikan Islam yang tidak mengabaikan *quwwatun natiqoh* (*reasoning*) atau kemampuan berpikir yang unik milik manusia dan mutlak perlu dikembangkan. Potensi ini, sebagaimana diungkapkan oleh Miskawaih mampu melahirkan ilmu pengetahuan, rasa malu, membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah, mengolah kecenderungan positif dan negatif, yang akhirnya anak bias mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri demi sesuatu yang terbaik baginya (Mas'ud, 2002: 53).

Proses pendidikan, dengan demikian mengupayakan kesempurnaan eksistensi kita sebagai makhluk yang paling mulia dengan kesempurnaan jiwa.

Adapun pendidikan Islam seperti yang dikemukakan al-Syaibani dalam Jalaludin (2001: 82) merujuk pada sumber wahyu. Kebenaran wahyu secara hakiki memang sejalan dengan yang diterima nalar

manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, manusia dinilai sebagai sosok pribadi yang unik terkait pada ketentuan Pencipta-Nya.

Menurut Mas'ud (2002: 62), pendidikan ideal dalam Islam selalu mencontoh pada model pendidikan yang telah diperlihatkan Muhammad s.a.w. pendidikan Islam yang diajarkan Nabi memberi respon dan solusi positif terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan fitrah individu dan kelompok. *Insan kamil* adalah sasaran pendidikan dalam Islam. Nabi telah meneladankan pendidikan manusia seutuhnya, *insan kamil*, dengan mendahulukan tauhid (*character building*) serta menawarkan penajaman kepekaan sosial yang bersumber dari wahyu, hati nurani, akal, jiwa dan realitas sosial.

Adapun tujuan pendidikan Islam maka diharapkan juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan dalam diri manusia rasa tanggung jawab, yaitu (1) tanggung jawab kepada Allah, (2) tanggung jawab kepada hati nuraninya. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan dalam Islam adalah menuju manusia seutuhnya (*insan kamil*) sebagaimana penciptan manusia itu sendiri.

Bertolak dari pengertian di atas maka pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang berasas atau berdasarkan nilai-nilai islam, falsafah Islam, sistem Islam, dan berpijak pada kurikulum yang berlandaskan dari al-Qur'an dan Sunnah (Islam).

## **b. Pendidikan Islam sebagai Lembaga**

Pendidikan Islam dapat diartikan pula sebagai lembaga, yaitu sebagaimana didefinisikan pada pengertian di bawah ini yaitu:

Pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan yang dikelola dilaksanakan dan diperuntukkan bagi umat Islam (Muliawan, 2005: 154).

Menurutnya pendidikan Islam memandang keluarga, masyarakat, dan tempat-tempat peribadahan maupun lembaga-lembaga pendidikan di luar sekolah, seperti TPA sebagai bentuk pendidikan, dan dalam sistem pendidikan nasional disebut pendidikan di luar sekolah (Muliawan, 2005: 154).

Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang mengajarkan nilai-nilai Islam sebagaimana terbentuk dalam falsafahnya, yang dikelola, dilaksanakan dan diperuntukkan bagi umat Islam.

Bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam di dalam sekolah kita kenal dengan madrasah, pesantren dan sekolah Islam.

### **1) Lembaga Pendidikan Islam: Pesantren**

Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang datang ke Indonesia. Oleh karena itu, namanya berasal dari dua kata bahasa asing yang berbeda. Pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti tempat menginap atau asrama (Zamakhsyari, 1983: 18 pada Daud, 1995:

145). Sedangkan pesantren dengan awalan pe- dan akhiran -an, berasal dari kata *santri*, bahasa Tamil yang berarti para penuntut ilmu (Yusuf Amir, 1984: 19 pada Daud, 1995: 145) atau diartikan juga guru mengaji.

Karena makna yang terkandung oleh namanya itu, sebuah pondok pesantren, selalu mempertahankan unsur- unsur aslinya, yaitu: pondok, mesjid, pengajian kitab-kitab klasik yang disebut juga kitab-kitab kuning, santri, dan kiai atau guru mengaji (Zamakhsari, 1983: 43 pada Daud, 1995: 146).

Sedangkan menurut Prof. John pesantren berasal dari bahasa Tamil, *santri* yang berarti guru mengaji. C.C. Berg juga berpendapat bahwa istilah *santri* berasal dari kata *shastri* (bahasa India) yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama hindu atau sarjana ahli kitab suci agama Hindu (Muliawan, 2005: 155).

Pada awal perkembangannya, ada dua fungsi pesantren, pertama, sebagai lembaga pendidikan; dan kedua, sebagai lembaga penyiaran agama. kendatipun kini telah banyak perubahan yang terjadi, namun inti fungsi utama itu masih melekat pada pesantren. Sampai kini, fungsi asli tersebut tetap dipelihara oleh pesantren dari pengaruh modernisasi.

Inti pendidikan yang ditanamkan di pondok pesantren adalah pendidikan watak dan pendidikan keagamaan. Dua hal tersebut merupakan cirri pendidikan di pesantren. Pendidikan



watak yaitu untuk membentuk akhlak atau kepribadian santri (sebutan bagi yang belajar di pesantren). Pendidikan keagamaan yaitu untuk mendalami agama secara intensif.

Selain itu sistem pendidikan pesantren dapat diselenggarakan dengan biaya yang relatif murah karena semua kebutuhan untuk belajar mengajar disediakan bersama oleh para anggota dengan dukungan masyarakat di sekitarnya (Habib Chirzin, 1979: 8 dalam Daud, 1995: 149).

## 2) Lembaga Pendidikan Islam : Madrasah

Pada permulaan abad ke-20 muncul lembaga pendidikan Islam baru yang disebut dengan *madrasah*. Perkataan madrasah berasal dari bahasa Arab, *darasa* artinya belajar. Dengan demikian, madrasah berarti tempat belajar. Lembaga pendidikan baru ini hadir di tengah tengah pendidikan Islam di Indonesia, terutama di luar Jawa, Karena berbagai dorongan dan alasan, sebagaimana yang disebutkan oleh Daud Ali (1995: 154), Pertama, sebagai manifestasi dan realisasi cita-cita pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Kedua, sebagai salah satu usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren, yang dipandang tidak memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan kerja, seperti lulusan umum yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Ketiga, adanya sikap sementara umat Islam yang lebih condong mengikuti sistem pendidikan ala Barat yang

lebih memungkinkan (anak-anak) mereka maju dalam ilmu ekonomi, dan teknologi.

Madrasah atau dalam bentuk klasiknya disebut dengan *college* sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah lembaga penyelenggara kegiatan belajar-mengajar secara terpadu dan sistematis. Prosedur pendidikannya diatur sedemikian rupa, ada guru, ada siswa, ada jadwal pelajaran yang berpedoman pada GBPP (garis-Besar Program Pengajaran) (Muliawan, 2005:155).

Dalam hal ukuran, kurikulum dan pengajaran, madrasah sama dengan masjid-akademi. Perbedaannya adalah kemandirian madrasah dari kontrol langsung otoritas keagamaan dan penyediaan beasiswa untuk para mahasiswa, dua hal yang tidak ditemui pada sistem pendidikan masjid di abad-abad sebelumnya (Stanton, 1994: 48).

Menurut Muslih (1991: 1) lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Pemerintah atau oleh swasta tapi mengikuti aturan Pemerintah, disebut dengan Madrasah mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas dan satu jenis Perguruan Tinggi yaitu Institut Agama Islam. Lembaga ini ijazahnya diakui oleh Negara dan bila ada 'kesempatan' atau pandai menggunakan kesempatan, lulusannya dapat menjadi Pegawai Negeri. Sedangkan yang dikelola oleh masyarakat dan atas swadaya sendiri disebut '*Pesantren*'. Ijazahnya atau sejenis penghargaan yang diberikan

lembaga ini kepada abiturernya, tidak mendapat pengakuan dari pemerintah artinya penghargaan tersebut tidak bias digunakan sebagai syarat untuk menjadi Pegawai Negeri, jika saja alumninya berkeinginan demikian.

Pembedaan ini terjadi karena Indonesia masih menganut suatu sistem yang menempatkan pengakuan formal akademik yang distandarisasikan sebagai syarat yang sah untuk mengisi lapangan kerja sebagai pegawai negeri, bukan atas dasar kemampuan atau keterampilan pegawai negeri. Ini sebenarnya warisan penjajah yang masih dilestarikan oleh bangsa ini.

Lembaga Pendidikan Islam yang ditetapkan oleh Pemerintah-dalam hal ini Madrasah- melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama tahun 1975, telah dipersamakan kedudukannya dengan sekolah-sekolah umum setingkat yang ada dibawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan persamaan ini, Madrasah masih berstatus sebagai sekolah agama, namun kadar pelajaran agamanya menjadi lebih banyak daripada sekolah Negeri dan lebih sedikit daripada pesantren.

Oleh karena pembedaan tersebut, maka muncul masalah klasik yang tetap aktual karena masih sering dipersoalkan oleh para pakar pendidikan (Islam) yaitu adanya dikotomi dalam

sistem pendidikan. Dualisme dikotomik ini, nampaknya sudah berkembang, dan dianggap sebagai sistem pendidikan modern yang sesuai dengan zaman.

Muslih (1991: 3) menyatakan bahwa sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi, karena dualisme dikotomik yaitu sistem pendidikan Barat yang dinasionalisasikan dengan menambah beberapa mata pelajaran agama (Islam) dan sistem pendidikan Islam yang berasal dari zaman klasik (tradisional) yang tidak diperbaharui secara mendasar, mempunyai arah yang berbeda atau dalam beberapa sisi penting justru bertolak belakang.

Secara ideal, pendidikan Islam berusaha mengantarkan manusia mencapai keseimbangan pribadi secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan maupun pancaindera. Oleh karena itu, pendidikan Islam berupaya mengembangkan semua aspek dalam kehidupan manusia meliputi spiritual, intelektual, imajinasi, keilmiyahan dan lain-lain, baik secara individu ataupun berkelompok serta senantiasa memberikan dorongan bagi kedinamisan aspek-aspek di atas menuju kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidup baik dalam hubungannya dengan al-Khaliq, dengan sesama manusia dan dengan alam (Muslih dalam Arifin, 1991: 8).

Dengan format seperti hal tersebut di atas, maka pendidikan Islam telah merangkul semua prinsip tujuan pendidikan dan jika dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya, maka beban yang dipikul oleh pendidikan Islam sangatlah berat. Rumusan ini merupakan acuan umum bagi pendidikan Islam, karena akhir tujuan adalah pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini akan berarti pula, bahwa pendidikan Islam mengandung konsep agama (*din*) konsep manusia (*insan*), konsep ilmu (*ilm* dan *ma'rifah*), konsep kebijakan (*hikmah*), konsep keadilan (*'adl*), konsep *amal*, (amal sebagai adab) dan konsep perguruan tinggi (*kuliyatul jami'ah*). Dengan perpaduan konsep-konsep inilah manusia mampu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat (Naquib Al-Attas pada Muslih, 1991: 9).

Maka dalam hal ini tidak ada dualisme dalam pendidikan, atau diistilahkan dengan pemisahan antara lembaga pendidikan, sehingga ada kesan yang berbeda pada setiap mata pelajaran yang diadakan dalam suatu lembaga pendidikan.

### **3) Lembaga Pendidikan Islam : Sekolah Islam**

Lembaga pendidikan Islam yang lainnya adalah sekolah Islam. Lembaga ini merupakan pengembangan madrasah dengan falsafah pendidikan yang dipengaruhi oleh ajaran Barat (Daud, 1995: 154). Kurikulumnya lebih dekat pada kurikulum sekolah-sekolah umum. Kendatipun predikatnya Islam, namun pelajaran

Islam kurang mendapat tempat dalam kurikulumnya. Yang diutamakan adalah persamaan status dan pengakuan yang sama dengan sekolah umum. Antara sekolah umum yang mengajarkan agama dengan sekolah Islam ini, terdapat persamaan, hanya dalam pelaksanaan pengajaran agamanya saja yang berbeda.

Perkembangan yang terakhir inilah yang menyebabkan para pemikir Islam di dunia pendidikan merumuskan kembali dasar filsafat pendidikan Islam, tujuan, materi, dan metodenya seperti yang telah dikemukakan (Daud, 1995:155).

Dalam ranah lain, disamping membedakan pendidikan keagamaan dengan pendidikan agama, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional membedakan juga pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Yang dimaksud dengan pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan, berada di bawah naungan serta pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan yang disebut pendidikan keagamaan adalah pendidikan atau sekolah keagamaan yang menyiapkan peserta didiknya menguasai pengetahuan khusus tentang ajaran keagamaan yang bersangkutan.

Pendidikan atau sekolah keagamaan ini berada di bawah naungan dan pengawasan Departemen agama,. Misalnya, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, negeri dan IAIN, serta

sekolah-sekolah keagamaan (diniyah) swasta lainnya. (Daud, 1995:161).

Pendidikan Islam sangat penting artinya bagi pembinaan umat atau masyarakat Islam. Oleh karena itu, sekolah Islam sangat berperan dalam hal kemajuan umat Islam.